WAJIB BELAJAR 9 TAHUN, KURIKULUM 1994 DAN PENGAJARAN KESENIAN DI SLTA [1)]

Idawati Syarif [2)]

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITERIMA TGL 29-6-95
SUMBER/HARGA hn
KOLEKSI KKI
NO. INVENTARIS 1237 /hd/95. W1(2)
KLASIFIKASI 375 Sya W1

1). Makalah disajikan dalam Seminar Sehari Pendidikan Kesenian dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 1994 di IKIP Padang. Padang, 14 Mei 1994.

2). Staf Pengajar Jurusan Sendratasik FPBS IKIP Padang.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

WAJIB BELAJAR 9 TAHUN, KURIKULUM 1994 DAN PENGAJARAN KESENIAN DI SLTA [1)]

Idawati Syarif [2)]

PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 Mei 1994, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun yang mulai dilaksanakan dalam Pelita VI. Dengan dicanangkannya wajib belajar 9 tahun, untuk masa yang akan datang diharapkan bangsa Indonesia berpendidikan minimal sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Esensinya, wajib belajar mewajibkan putra putri usia sekolah di Indonesia mendapatkan pendidikan dasar selama 9 tahun, tidak ada pengecualian. Untuk hal tersebut diberikan berbagai kemudahan dengan segala fasilitasnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di TVRI pada suatu kesempatan

Berbeda dengan pendidikan dasar 9 tahun, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama ini memungkinkan banyaknya putra putri Indonesia yang tidak menyelesaikan SD. Terpenggalnya SD dan SMP menyebabkan banyak anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak dapat menyelesaikan sekolahnya. Seperti diketahui SD diselesaikan selama 6 tahun, setelah menyelesaikan EBTA baru dapat melanjutkan ke SMP selama 3 tahun.

---

1). Makalah disajikan dalam Seminar Sehari Pendidikan Kesenian dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 1994 di IKIP Padang. Padang, 14 Mei 1994.

2). Staf Pengajar Jurusan Sendratasik FPBS IKIP Padang.

Pada saat ini belum semua anggota masyarakat menyadari makna kata wajib pada kata wajib belajar. Kata wajib pada kata wajib belajar tersebut tanpa dikenakan sanksi bila tidak dilaksanakan. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kata wajib berarti bila tidak dilaksanakan akan menerima sanksi. Dirjen Dikdasmen (Achmadi, 1994) menegaskan bahwa wajib belajar 9 tahun pada dasarnya tidak bersifat paksaan. Dirjen juga menyatakan bahwa pengertian atau persepsi mengenai wajib belajar di Indonesia berbeda dengan di negara-negara maju. Di negara-negara maju bila tidak dilaksanakan diberikan sanksi kepada orang tua, sedangkan di Indonesia wajib belajar yaitu terbukanya peluang yang luas bagi peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar 9 tahun. Sasaran utama program ini menumbuhkan aspirasi pendidikan, sehingga orang tua maupun peserta didik merasa terpanggil untuk melaksanakan pendidikan. Untuk tahap pertama masyarakat diberi pengertian tentang wajib belajar 9 tahun dan dihimbau melaksanakannya dengan memasukkan anak usia sekolah minimal 9 tahun. Pada tahap berikutnya masyarakat diikutsertakan.

Pada saat ini 6,8 juta anak usia sekolah sudah bersekolah dan 6 juta lagi tidak ada sekolah tempat menampungnya. Untuk itu pemerintah memandang perlu mengikutsertakan masyarakat untuk penyediaan sekolah, guru, laboratorium, dan buku-buku. Pemerintah melalui Departemen Agama membangun 37.000 ruangan kelas di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama H. Tarmizi Taher pada suatu wawancara di TVRI.

Seiring dengan lahirnya wajib belajar 9 tahun dimunculkan pula kurikulum 1994 yang sangat erat hubungannya dengan wajib belajar. Kurikulum 1994 adalah salah satu sarana penunjang untuk terlaksananya wajib belajar 9 tahun. Dengan hadirnya kurikulum 1994 diharapkan wajib belajar 9 tahun dapat berjalan dengan baik dan sukses. Presiden Soeharto menekankan bahwa gerakan wajib belajar harus sukses. Untuk itu pemerintah merasa perlu mendorong keikutsertaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan menanamkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM DI INDONESIA

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, pemerintah maupun negara dalam abad informasi ini. Demikian pentingnya, pendidikan selalu ditumbuh kembangkan secara sistematis oleh para pengambil keputusan dan kebijakan di Republik ini. Pembahasan demi pembahasan selalu diupayakan agar pendidikan benar-benar dapat memberikan masukan yang berarti, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Meskipun pembaharuan terus menerus dilaksanakan, namun tidak akan memiliki ujung akhir sampai kapanpun. Mengapa? Karena persoalan pendidikan selalu ada selama peradaban dan kehidupan manusia itu sendiri masih ada. Pembaharuan pendidikan tidak akan pernah dapat diakhiri. Tidak semua pembaharuan pendidikan dapat dihitung atas dasar efisiensi dan untung rugi, karena pendidikan memiliki misi penting yang sulit dinilai dari segi ekonomi yaitu misi kemanusiaan.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Untuk menjaga relevansi dan efisiensi pengambilan kebijakan, juga dilakukan pembaharuan kurikulum dan pembaharuan dalam bidang pengajaran. Pendekatan cara belajar siswa SD yang kemudian dikenal sebagai CBSA adalah merupakan salah satu pembaharuan yang telah dilakukan dan telah diintegrasikan selama kurang lebih 10 tahun terakhir.

Dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 2/1989 pasal 45 disebutkan bahwa secara berkala dan bekelanjutan pemerintah dalam hal ini Depdikbud melakukan penilaian terhadap kurikulum dan prasarananya sesuai denga kebutuhan dan perkembangan keadaan. Evaluasi yang dilaksanakan dapat berupa revisi kurikulum atau mengubahnya sama sekali. Dalam hal ini kurikulum 1984 mengikuti aturan tersebut dengan melalui kajian terhadap berbagai kelemahan terdahulu. Bukan mustahil kurikulum 1984 yang sudah berjalan 10 tahun tidak lagi relevan dengan tuntutan dan kondisi kekinian.

Penyusunan kurikulum baru, dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pemikiran yang teliti dan cermat. Untuk itu harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, keadaan lingkungan dan kesesuaian peserta didik. Isi kurikulum harus paralel dengan perkembangan lingkungan baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, maupun perkembangan zaman secara umum. Kedua, menyangkut kebutuhan bangsa itu sendiri misalnya masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Untuk saat ini kebijakan menitik beratkan pada sumberdaya manusia yang perlu menjadi pertimbangan. Ketiga, penyesuaian dengan berbagai jenjang pendidikan.

Dalam Kurikulum 1994, wajib belajar 9 tahun khusus memperhatikan adanya peningkatan jam pelajaran pada bidang-bidang tertentu dan penurunan pada bidang-bidang lainnya. Sebagai contoh, untuk mata pelajaran kesenian, kerajinan dimasukkan muatan lokal. Ini dimaksudkan agar lulusannya punya pandangan jauh kedepan dalam hal keterampilan dan menjadi calon tenaga kerja yang handal. Hal ini lebih jelas terlihat untuk tingkat SD dan SMP.

Kurikulum 1968

Ciri-cirinya :

1. Materi yang disajikan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini.
2. Mata pelajaran yang dipelajari minggu lalu dihubungkan dengan yang akan dipelajari.
3. Kemampuan siswa dipertimbangkan, dan dalam proses belajar mengajar siswa bersifat pasif.
4. Mata pelajaran yang dipelajari :
   - Ilmu Pasti
   - Pengetahuan Alam
   - Ilmu Sosial
   - Budaya

Kelemahannya :

1. Tidak memberi motivasi kepada siswa untuk mencapai tujuan pelajaran.
2. Tidak memberikan kesempatan kepada siswa belajar sesuai dengan kemampuannya.

3. Karena guru yang lebih akif, maka kreatifitas siswa terhambat.
4. Siswa tidak banyak mendapat pertolongan guru.

Kurikulum 1975

Ciri-cirinya :

1. Materi yang disajikan sangat sesuai dengan teori sehingga peserta didik menjadi teoritis. Nilai dan sikap serta keterampilan peserta didik lebih rendah.
2. Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan (orientasinya tujuan).
3. Sebelum materi baru disajikan dalam sistim belajar mengajar terlebih dahulu dilakukan pre-tes dan akhir dengan pos-tes.
4. Mata pelajaran yang dipelajari terdiri dari :
   - IPA
   - IPS
   - Bahasa

Kurikulum 1984

Ciri-cirinya :

1. Siswa dituntun untuk belajar lebih aktif.
2. Berorientasi pada tujuan.
3. Lebih mengutamakan proses di samping tujuan.
4. Program atau materi yang diberikan :
   - A1 / Fisika
   - A2 / Biologi

- A3 / Sosial
- A4 / Budaya

Kurikulum Baru (1994)

Memperbaiki mutu pendidikan, salah satu caranya adalah melalui perbaikan kurikulum. Hal inilah yang dilakukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, instansi yang ditugasi mengurusi pengajaran di sekolah.

Kurikulum 1994 dibedakan dengan kurikulum 1968, 1975, dan 1984. Isinya adalah uraian mata pelajaran dan tujuannya. Kurikulum ini sudah disiapkan sejak tahun 1990, tidak lama setelah keluarnya UU No. 2/1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional. Jadi tidak benar bila menteri diganti kurikulum berganti pula, karena kurikulum 1994 disusun sejak era Menteri Fuad Hasan dan ditetapkan di era Menteri Wardiman.

Pada tahap perencanaan, kurikulum diadopsi melalui pemikiran, ide, dan kerangka formal yang ada. Program dan pengembangan kurikulum ini melibatkan sejumlah pejabat teras departemen, ahli bidang studi, ahli didaktik/metodik, maupun sejumlah guru yang dinilai bepengalaman. Sebelum ditetapkan buram, GBPP dibahas para ahli dn guru di tiga propinsi. Kurikulum 1994 secara resmi dituangkan dalam tiga aturan Mendikbud 1993.

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang hanya mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) maka kurikulum 1994 dibuat sesudah lahirnya UU No.2/1989. Pemikiran dasar yang menjadi napas kurikulum 1994 cukup revolusioner. Untuk

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

pertamakalinya ditegaskan, pendidikan bertujuan mempersiapkan siswa timbal balik dengan budaya dan lingkungannya.

Pendidikan menengah bertujuan mempersiapkan kemampuan anak agar dapat berkembang dalam dunia kerja, atau meneruskan ke pendidikan tinggi. Dengan demikian ukuran menjadi lebih jelas, pendidikan dapat dikatakan gagal bila produknya tidak mampu mencapai salah satu dai kedua tujuan itu.

Penguasaan pengetahuan dasar yang rendah dijawab dengn mengembalikan penekanan pada sejumlah mata pelajaran pokok, seperti berhitung, membaca dan menulis. Kesan bahwa kurikulum 1994 untuk SD kembali ke model lama tidak sepenuhnya salah. Matematika yang dianggap menjadi biang kerok ketidak mampuan siswa dalam berhitung sederhana, diberi aksentuasi dengan menampilkan mata pelajaran Matematika dan Berhitung. Bila sebelumnya konsep himpunan dipekenalkan saat siswa berkenalan dengan bilangan, kini konsep himpunan baru diberikan pada tahun-tahun terakhir SD. Mata pelajaran IPS dan IPA baru diberikan di kelas tiga sehingga tersedia waktu yang memadai bagi siswa untuk mendalami kemampuan dasar hitung, baca, dan tulis.

Seiring dengan perampingan itu, jumlah jam pelajaran ditambah. Di tingkat SLTP dan SLTA jumlah jam pelajaran ditambah dari 38-39 menjadi 42 jam masing-masing 45 menit. dibandingkan dengan beberapa negara maju, jumlah jam pelajaran itu lebih banyak. Namun secara riil barangkali tidak demikian, bila dipertimbangkan dengan kelengkapan fasilitas yang ada seperti buku dan laboratorium. Jadi dengan penambahan jam

pelajaran itu diharapkan dengan berbagai kendala yang ada, proses belajar mengajar di sekolah dapat dilaksanakan secara optimal.

Guru diberi keleluasaan lebih besar dalam pelaksanaan pendidikan. Penjabaran Kurikulum 1994 dalam silabus atau GBPP tidak terlalu detail tetapi hanya memuat prinsip-prinsipnya saja. Guru juga diberi kesempatan mengembangkan metode pengajaran yang beragam. Pendek kata Kurikulum 1994 cukup luwes, tetapi juga bisa berarti guru tidak melakukan apa-apa karena guru tidak tahu apa yang harus dikerjakan.

SEJUMLAH PERBEDAAN

Ada sejumlah perbedaan antara Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994. Pemenggalan waktu pelajaran di SMP dan SLTA tidak lagi menggunakan sistim semester tetapi caturwulan. Dengan demikian pemenggalan waktu belajar dari SD sampai SLTA seragam. Mata pelajaran Kesenian dan Keterampilan disatukan, IPS dan IPA untuk kelas 1 dan 2 SD dihapuskan, tetapi materinya digunakan untuk pelajaran Bahasa Indonesia.

Ditingkat SLTA penjurusan SMU (Sekolah Menengah Umum) dilaksanakan pada tahun ketiga, saat siswa masuk kelas tiga. Konsekuensinya mata pelajaran Fisika, Kimia, dan Biologi harus diikuti siswa selama 2 tahun. Jumlah jam pelajaran Matematika dan Fisika ditambah.

Betapa baiknya suatu Kurikulum, tetapi tidak mungkin sempurna. Orang tetap bisa memperdebatkan dan selalu terbuka untuk penyempurnaan atau paling tidak penyesuaian di lapangan. Disain Kurikulum 1994 cukup memadai untuk menjawab keku-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

rangan yang terjadi dalam proses pendidikan sebelumnya. Namun semua kembali kepada para guru, pelaksana di lapangan. Kunci kurikulum adalah pelaksanaan, karena tetap saja ada sekolah yang baik dan yang buruk, sekalipun kurikulumnya satu.

Sekalipun demikian kita mengharapkan tidak ada kesenjangan yang besar antara disain kurikulum dengan praktek di lapangan. Apabila kesenjangan itu sangat besar bukan saja pemerataan mutu pendidikan tidak tercapai, tetapi akan banyak kurikulum yang berlaku. Bukan saja ada Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994 yang berjalan bersama-sama tetapi juga "Kurikulum Lapangan" (Suyanto, 1994).

PERBANDINGAN KURIKULUM 1984
DENGAN KURIKULUM 1994

KURIKULUM 1984	KURIKULUM 1994
SEKOLAH DASAR	
* Matematika	* Matematika dan Berhitung
* PMP dan PSPB terpisah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	* PMP dan PSPB disatukan
* Pendidikan Kesenian dan Keterampilan terpisah	* Pendidikan Kesenian dan Keterampilan disatukan
* IPA dan IPS diberikan sejak kelas 1	* IPA dan IPS diberikan sejak kelas 3
* Tidak ada muatan lokal	* Ada muatan lokal
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	
* Pemenggalan waktu belajar dalam sistim semester	* Pemenggalan waktu belajar dalam sistim caturwulan
* Tidak ada muatan lokal	* Ada muatan lokal
* Jam pelajaran 38-39 per minggu	* Tiap sesi 45 nenit

SEKOLAH MENENGAH UMUM

* Pemenggalan waktu belajar dalam semester
* Penjurusan saat siswa naik kelas 2
* Pilihan program studi Fisika, Biologi, IPS, Bahasa
* Jam pelajaran 38-39 per minggu
* Matematika untuk IPS diintegrasikan dalam mata pelajaran ekonomi

* Pemenggalan waktu belajar dalam caturwulan
* Penjurusan saat siswa naik kelas 3
* Pilihan program studi Bahasa, IPA. IPS
* Jam pelajaran 42 per minggu
* Matematika untuk IPS

PENERAPAN KURIKULUM 1994 PADA BIDANG STUDI PENDIDIKAN KESENIAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Pendidikan Nasional adalah membentuk manusia seutuhnya. Tujuan umum Pendidikan Kesenian yakni agar siswa dapat memiliki kemampuan berapresiasi terhadap alam lingkungan dan karya seni, serta dapat memanfaatkan pengalamannya untuk berkomunikasi secara kreatif melalui kegiatan berkarya dalam usaha mengembangkan dn menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. Tujuan pendidikan seni, khususnya di sekolah, dibagi bagi terdiri dari tujuan pendidikan seni tari, seni musik, dan seni drama.

Tujuan Pendidikan seni Tari :

1. Siswa dapat memahami pengertian dan unsur-unsur tari, fungsi, bentuk, jenis tari serta mampu nenerapkannya melalui pengalaman.
2. Siswa mampu membawakan/menyajikan suatu bentuk tarian didasarkan pada budaya daerah setempat.
3. Siswa mampu mengenal dan menghargai karya seni tari.
4. Siswa mampu menerapkan hasil yang diperolehnya.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

5. Siswa mampu menyajikan gerak melalui eksplorasi dan keak tifan siswa tersebut.
6. Siswa mampu memahami nilai-nilai keindahan dan perkembangan seni tari.

Tujuan Pendidikan Seni Musik :

1. Siswa dapat memahami dan mengetahui unsur-unsur musik.
2. Siswa dapat merasakan dinamik, mengetahui tangga nada, klasifikasinya serta terampil menerapkannya ke dalam lagu.
3. Siswa memiliki kemampuan tentang irama dan mampu membaca notasi, melodi, letak not, dan mampu membacanya.
4. Siswa memeliki pengetahuan tentang birama, garis birama dan tanda-tanda istirahat dalam musik/lagu.

Tujuan Pendidikan Seni drama

1. Siswa dapat memahami seluk beluk drama baik secara teori tis maupun praktis.
2. Siswa dapat memahami berbagai bentuk drama, jenis drama, dan perkembangannya.
3. Siswa mampu menghargai dan mengambil manfaat nilai-nilai seni dalam drama.
4. Siswa dapat memainkan drama dengan sederhana.

Melalui catatan khusus pada Kurikulum 1984 terlihat bahwa jumlah materi pokok semester 1 untuk bidang studi kesenian adalah :

1. Jumlah materi pokok pada semester 1 terdiri dari 8 buah masing-masing 4 pokok mata pelajaran pendidikan seni secara umum, 4 pokok materi pelajaran seni musik, tari,

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

dan drama. Untuk musik 50 % pengetahuan tentang seni secara umum 50 %. Untuk tari 20 % tentang pengetahuan tari secara umum, 40 % tuntunan umum, 40 % praktek tari. Untuk seni drama pokok bahasan semester 1 banyaknya 2 buah terdiri dari 4 pokok bahasan bidang seni dan 3 pokok bahasan seni drama. Dari jumlah tersebut 60 % berisi pengetahuan dasar umumnya dan seni drama khususnya, sedangkan yang 20 % berisi pelajaran praktek dasar seni drama.

2. Dalam semester 2 adalah pengembangan pelajaran yang telah dimiliki pada semester sebelumnya. Jadi, segala perangkat untuk pelaksanaan Kurikulum 1984 telah dismpaikan kepada guru. Bagaimana dengan Kurikulum 1994? Penerapan Kurikulum 1994 pada pendidikan dassar dan menengah terlampau tergesa-gesa. Hal ini disampaikan oleh Staf Pengajar Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) IKIP Jakarta, (Soepijadi , 1994).

Perangkat kurikulum yang menjadi pegangan guru sampai saat ini belum diterima lengkap, termasuk buku petunjuk guru, maupun buku-buku pelajaran untuk setiap bidang studi. Apabila buku-buku tersebut termasuk buku petunjuk guru bidang kesenian, GBPP bidang studi kesenian, belum sampai ke tangan guru bidang studi tersebut maka dikhawatirkan guru kesenian tidak sempat lagi melakukan pendalaman materi sesuai dengan pokok-pokok materi yang ada dalam Kurikulum 1994. GBPP bidang studi kesenian dalam Kurikulum 1994 hanya memuat hal-hal pokok dan tidak terinci, sehingga dalam pelaksanaannya

perlu suatu penjabaran. Bagi guru-guru bidang studi yang telah senior dan mengajar sesuai dengan bidang studinya, hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah. Tetapi bagi guru-guru muda akan mengalami banyak kesulitan terutama bila mereka belum ditatar tentang penjabarannya. Selain itu bila semua materi kesenian yang akan diajarkan diserahkan kepada guru penjabarannya maka dapat menjadi acak-acakan. Masalah lain adalah kapan dan di mana bisa diperoleh buku petunjuk guru, maupun buku bidang studi tersebut, termasuk untuk guru bidang studi kesenian. Buku berupa pedoman kegiatan belajar mengajar, penilaian, layanan bimbingan dan conseling serta supervisi, administrasi sampai saat ini belum diterima. Masalah tersebut tidak mendapat jawaban yang memuaskan.

Dalam Kurikulum 1994, guru bidang studi kesenian diharapkan lebih aktif dan kreatif. Selain itu, bidang studi kesenian sampai saat ini kurang diminati siswa. Dalam Kurikulum 1994 bidang studi kesenian hanya memuat pokok-pokok materi saja materi tanpa pembahasan yang jelas seperti yang terdapat dalam Kurikulum 1984. Dalam hal pengalokasian waktu, bidang studi kesenian dalam Kurikulum 1994 untuk SLTA hanya diajarkan di kelas 1 selama 2 semester dengan 1 jam tatap muka. Untuk siswa yang memiliki minat dan bakat yang lebih baik, di samping materi yang ada dalam kurikulum, mereka diberi kesempatan untuk mengembangkannya dan melatih keterampilan pada jam-jam ekstra kurikuler yang dapat diikuti dari kelas 1 sampai semester 5.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Dalam jam ekstra kurikuler guru dapat memberikan materi sesuai dengan kebutuhannya (muatan lokal). Penjabaran materi muatan lokal inmi tidak ada dalam Kurikulum 1994. Untuk itu diharapkan guru mememilik inisiatif dan kreatifitas supaya program wajib belajar, Kurikulum 1994 dapat dilaksanakan dengan sukses. Suksesnya program ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menciptakan manusia-manusia yang terampil dan handal. Diharapkan dengan kerjasama pemerintah, terutama Depdikbud dengan instansi terkait lainnya, masyarakat, orang tua murid, apa yang menjadi tujuan Pendidikan Nasional yaitu menciptakan manusia seutuhnya bisa tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berbagai pengalaman di negara maju membuktikan peningkatan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita. Faktor pendidikan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap produktifitas nasional. Telah banyak usaha pembaharuan dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tujuan pembaharuan ini pada akhirnya adalah untuk menjaga agar produk pendidikan kita tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau persyaratan untuk pendidikan lanjutan pada jenjang berikutnya.

Dari pembaharuan dengan pencanangan wajib belajar 9 tahun, Kurikulum 1994, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Wajib belajar yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994 yang lalu adalah untuk menjawab tantangan dalam era PJP II dan arus globalisasi.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

2. Untuk menunjang program wajib belajar Pendidikan Dasar Se-Sekolah Dasar 9 tahun juga dicanangkan penerapan Kurikulum 1994.
3. Kurikulum 1994 akan diterapkan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
4. Kurikulum 1994 berbeda dengan Kurikulum 1984.
5. Kunci keberhasilan kedua program pemerintah tersebut adalah kerjasama antara instansi pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Kunci keberhasilan itu adalah relevansi antara peningkatan Pendidikan Dasar dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru dan murid.

Kita tidak perlu pesimis untuk menerapkan Kurikulum 1994, terutama berkaitan dengan bidang studi kesenian. Namun untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka Kurikulum 1994 perlu dikaji lebih mendalam. Kendala yang mungkin muncul perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan Kurikulum 1994 untuk semua guru bidang studi, khususnya untuk guru bidang studi kesenian adalah :

1. Beban guru umunya, guru kesenian khususnya bertambah berat karena jam pelajaran kesenian hanya 1 jam dan itupun digabung dengan bidang studi keterampilan. Selain itu topik yang harus diajarkan cukup banyak dan tidak cocok dengan jam yang tersedia.
2. Adanya guru yang mengajar bidang studi kesenian bukan gu-

1237/hd/95-W1(2)

375
Sya
W1

ru bidang studi tersebut. Misalnya guru yang mengajar kesenian, bukan guru bidang studi tersebut.

3. Guru harus mencari metode baru untuk mengajarkan materi yang tersedi karena bertambahnya jam pelajaran seluruhnya menjadi 42 jam dan berkurangnya jam pelajaran kesenian menjadi 1 jam.
4. Terdapat indikasi kurangnya penghargaan masyarakat terhadap guru. Hal ini terlihat dengan banyaknya orang tua memasukkan anaknya ke tempat bimbingan belajar.

Alternatif pemecahannya :

1. Memperhatikan kesejahteraan guru, sehingga wibawa guru dadapat ditingkatkan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembaharuan pendidikan.
3. Meningkatkan mutu guru dengan memberi kesempatan menambah ilmu termasuk guru kesenian.
4. Sebaiknya ada masa transisi untuk penerapan Kurikulum 1994
5. Guru mengajar bidang studi yang dikuasainya.
6. Berikan informasi yang jelas mengenai petunjuk pelaksanaan baik buku petunjuk untuk guru, maupun untuk siswa.
7. Lakukan evaluasi terhadap kulaitias guru dan mutu lulusan secara berkala.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

DAFTAR BACAAN

Achmadi, Z. A. 1994. Buku pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Kompas, 2 April 1994.

Kompas. 1994. Presiden tekankan gerakan wajib belajar 9 tahun harus sukses. Kompas, 7 Mei 1994.

Jui, H. 1994. Beban guru semakin berat. Kompas, 2 Mei 1994.

Rokcalva dan Marjeni. 1994. Kurikulum 1994 dan wajib belajar. Ganto Edisi 29 tahun IV, April 1994.

Soebroto. 1994. Mayoritas lulusan SMP DKI tak layak lanjutkan ke Sekolah Menengah Umum. Kompas, 8 April 1994.

Soepijadi. 1994. Penerapan Kurikulum 1994 tergesa-gesa. Kompas, 1 Mei 1994.

Suyanto. 1994. Kunci keberhasilan pembaharuan pendidikan nasional. Kompas, 1 Mei 1994.